

## **Implementasi Program Perlindungan Anak dalam Menekan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Wonogiri**

**Nur Aini Kusuma Putri, Tiyas Nur Haryani, Sri Yuliani**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret  
e-mail: nuraini02@student.uns.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Perlindungan Anak dalam menekan kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles and Huberman. Penelitian ini menggunakan konsep dari Jones (1996) dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Perlindungan Anak di Kabupaten Wonogiri sudah terlaksana meskipun masih ada penambahan angka kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri. Dilihat dalam tahap pengorganisasian, bahwa Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Program Perlindungan Anak sesuai dengan segala aturan yang berlaku, bekerja sama dengan beberapa lembaga daerah dan dengan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan program perlindungan anak. Dalam tahap interpretasi, Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri sudah melaksanakan sosialisasi sebagai pelaksanaan program perlindungan anak, yang mana dalam pelaksanaan ini melibatkan banyak pihak. Sedangkan, dalam tahap aplikasi, Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri menilai keberhasilan program dari cara terima dan tanggap dari masyarakat, terutama dari korban kekerasan.

**Kata Kunci: Implementasi, Kekerasan Anak, Program Perlindungan Anak**

### **Abstract**

This research aims to determine the implementation of the Child Protection program in suppressing violence against children in Wonogiri Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews and documentation. Test the validity of the data using triangulation of sources and methods. The data obtained were analyzed using the Miles and Huberman model. This research uses the concept from Jones (1996) where policy implementation consists of three main activities that are very important, namely *organization, interpretation, and application*. The results of the research show that the implementation of the Child Protection Program in Wonogiri Regency has been carried out although there is still an increase in the number of cases of violence against children in Wonogiri Regency. It can be seen from the organizing stage that the Wonogiri Regency PPKBP3A National Service is implementing the Child Protection Program in accordance with all applicable

regulations, collaborating with several regional institutions and with adequate facilities for implementing the child protection program. In the interpretation stage, the Wonogiri Regency PPKBP3A Service has carried out socialization as an implementation of the child protection program, which in this implementation involves many parties. Meanwhile, in the application stage, the Wonogiri Regency PPKBP3A Service assessed the success of the program from the acceptance and response from the community, especially from victims of violence.

**Keywords: Child Protection Program, Child Violence, Implementation**

### **Pendahuluan**

Anak merupakan aset, aset bangsa, aset masyarakat dan aset keluarga. Adanya istilah anak bangsa, anak negeri, tunas bangsa, menunjukkan betapa pentingnya anak bagi suatu negara dan suatu bangsa. Tanpa adanya anak, suatu negeri atau bangsa akan mengalami kepunahan, karena tidak akan ada generasi penerus. Namun, pada saat ini banyak permasalahan yang dihadapi anak di Indonesia, yaitu kemiskinan, gizi rendah, sulitnya akses pendidikan, eksploitasi, dan kekerasan. Hal tersebut berdasarkan pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan, yaitu 17.641 kasus pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021, yaitu 15.914 kasus. Angka tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun 2020, yaitu 12.412 kasus. Kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia terdapat beberapa jenis, yaitu seksual, psikis, fisik, penelantaran, trafficking, eksploitasi, dan lainnya.

Pemerintah pusat dan daerah sudah berupaya melakukan penanganan dan pencegahan agar kasus kekerasan pada anak di Indonesia menurun. Namun, tetap saja kasus kekerasan pada anak di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan data Simfoni-PPA, pada tahun 2020-2021 terdapat 3 provinsi yang mengalami kenaikan secara berkala, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tetapi, pada tahun 2022, provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mengalami penurunan jumlah kasus yang cukup signifikan, terutama Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan adanya suatu praktik baik di Jawa Tengah yang sebelumnya pernah memperoleh pengakuan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2019. Meskipun demikian, tetap masih ada kasus kekerasan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah Kabupaten Wonogiri. Yang mana, per Oktober 2022, Kabupaten Wonogiri berada di urutan 15 tersendah dari 36 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan kasus kekerasan pada anak. Wonogiri mengalami penurunan kasus dari 41 kasus pada tahun 2021 menjadi 13 kasus per Oktober 2022. Hal ini, menunjukkan adanya suatu praktik baik di Kabupaten Wonogiri. Mengingat pengalaman 3 tahun sebelumnya, kasus

kekerasan anak di Kabupaten Wonogiri selalu signifikan kenaikannya, yaitu pada tahun 2019 ada 18 kasus, tahun 2020 ada 24 kasus dan tahun 2021 ada 41 kasus. Namun, pada tahun 2022 tengah mengalami penurunan signifikan.

Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki program perlindungan anak. Program Perlindungan Anak tersebut dipayungi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Tupoksi mengenai ranah perlindungan anak dijalankan oleh organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Wonogiri. Untuk memaksimalkan program, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Wonogiri membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diturunkan hingga ke desa-desa untuk pendampingan (Dessy, 2021). Program perlindungan anak dinilai berhasil setelah satgas bergerak ke lapangan, karena kasus kekerasan terhadap anak turun 19 kasus dari tahun 2016 ke 2017, sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 turun 6 kasus (Dessy, 2021). Namun, menurut data BPS diketahui sejak tahun 2019-2021 terjadi penambahan kasus kekerasan pada anak dan di tahun 2022 mengalami penurunan kasus. Penelitian ini menggunakan teori Jones (1996) untuk menilai implementasi program perlindungan anak. Dalam teori ini, implementasi kebijakan mencakup tiga kegiatan utama yang diperlukan, yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Penelitian terkait implementasi program untuk menekan kekerasan pada anak di Indonesia sudah banyak yang meneliti, yaitu penelitian oleh Boreel et al., (2022) mengenai “Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Kota Sukabumi”. Penelitian ini, meneliti mengenai implementasi program perlindungan anak dalam menekan kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri belum pernah ada yang meneliti. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai implementasi program perlindungan anak dalam menekan kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Wonogiri.

## **Metode**

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun pada September 2022 hingga penelitian selesai dilakukan dan dikeluarkannya surat keterangan telah selesai melakukan penelitian. Penelitian ini berfokus di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Wonogiri dimana merupakan

*central spot* pelaksanaan dan pusat data dari program perlindungan anak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini, menguraikan fakta-fakta atau keadaan dari hasil temuan secara mendalam tentang implementasi program perlindungan anak dalam menekan kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan implementasi program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri terutama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Wonogiri untuk menekan kekerasan pada anak. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mendukung penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik interaktif yaitu proses wawancara dan teknik non-interaktif yaitu berupa observasi dan pencatatan dokumen dan arsip. Untuk menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pengujian dengan melihat sesuatu dari berbagai sudut, baik dari sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten di Solo Raya dengan kasus kekerasan pada anak yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dikarenakan banyaknya kasus kekerasan pada anak, pemerintah kabupaten Wonogiri menunjuk Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri terutama Sub Bagian P2TP2A sebagai pelaksana program perlindungan anak. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah kabupaten Wonogiri untuk menurunkan angka kekerasan pada anak. Dalam pelaksanaan program perlindungan anak terdapat sosialisasi yang mana dalam sosialisasi dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung atau sumberdaya pendukung, yaitu sumberdaya fisik maupun nonfisik. Sumberdaya fisik meliputi fasilitas gedung atau barang yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan untuk sumberdaya nonfisik dilihat dari kerjasama antara Dinas PPKBP3A dengan lembaga lain, seperti Unit PPA Polres, Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri, Dinas Kesehatan, TP PKK, Satgas PPA dan Yayasan. Sumber nonfisik lainnya adalah anggaran atau dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program berupa anggaran tidak khusus, yang mana tidak diketahui dengan pasti jumlah anggaran dari tahun 2021-2022 untuk program perlindungan anak. Karena, anggaran untuk program perlindungan anak ini memang campur dengan beberapa program lain untuk anak.

Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung biasanya dilakukan oleh Dinas PPKBP3A ke daerah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Namun, saat ini aparat birokrasi yang ada di daerah kecamatan mulai menyadari pentingnya sosialisasi, sehingga memiliki inisiaif untuk mengundang Dinas PPKBP3A ke kecamatan untuk memberikan sosialisasi mengenai kekerasan anak. Sedangkan, sosialisasi tidak langsung dapat melalui berbagai media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) berupa *pamphlet*, *leaflet*, *banner* dan *billboard* atau *videotron* himbauan dan info *call center* untuk pelaporan jika ada masalah kekerasan anak. Adapun *call center* untuk pengaduan menggunakan *call center* P2TP2A dan Satgas PPA.

Dari hasil wawancara dengan para informan terkait tahap aplikasi terhadap implementasi program perlindungan anak untuk menekan kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri, didapatkan hasil bahwa Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri tidak mematok keberhasilan program. Namun, keberhasilan program perlindungan anak dilihat dari sudah tercapai atau belum tercapainya sosialisasi. Jika, sosialisasi sudah menyeluruh dan penanganan korban sudah maksimal, maka dapat dikatakan program tersebut berhasil. Ketika sudah banyak masyarakat yang berani melapor, maka dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri dengan beberapa lembaga terkait sudah berhasil.

Selain itu, dari hasil wawancara ditemukan bahwa ada kegiatan lain yang diberikan Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri selain sosialisasi yaitu berupa layanan untuk korban. Layanan tersebut disesuaikan dengan jenis kekerasan yang didapat korban. Berikut beberapa layanan yang diberikan Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri kepada korban kekerasan:

- a. Layanan kesehatan, seperti kebutuhan visum, rehabilitasi kesehatan, konsultasi psikolog, maka layanan dilakukan di puskesmas atau rumah sakit yang masuk dalam jaringan P2TP2A.
- b. Layanan rehabilitasi sosial, seperti bimbingan konseling, penempatan di rumah aman, hingga bimbingan rohani.
- c. Layanan bantuan dan penegakan hukum bagi korban dan pelaku kekerasan, yang mana penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara bisa melalui jalur diversi ataupun jalur pidana.

Ketiga layanan tersebut yang diberikan Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri yang bekerja sama dengan lembaga seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kejaksaan Negeri. Namun, ada satu layanan yang memang wajib diberikan untuk korban, yaitu layanan konseling psikolog. Karena, pada saat ini perlu disadari bahwa, mental korban yang pernah mengalami kekerasan tidak bisa diabaikan begitu saja. Untuk survei kepuasan para korban di Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri masih kurang, meskipun sudah dilaksanakan. Dikarenakan,

Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri masih menerapkan survei kepuasan secara manual atau di atas kertas. Yang mana, survei kepuasan tersebut bisa saja mengalami pemalsuan jawaban atau hal kurang baik lainnya. Jika dilihat dari perkembangan era digital yang sudah maju, seharusnya Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri membuat web atau Google Formulir untuk survei kepuasan para korban.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan Implementasi Program Perlindungan Anak dalam Menekan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri sudah memanfaatkan secara baik sumberdaya yang ada, baik sumberdaya fisik maupun nonfisik. Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri sudah bekerjasama dengan baik dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan program perlindungan anak, seperti Unit PPA Polres, Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri, Dinas Kesehatan, TP PKK, Satgas PPA dan Yayasan.
2. Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri sudah mengkomunikasikan program perlindungan anak dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan hal penting dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat. Dalam menghadapi isu-isu kekerasan pada anak, sosialisasi terkait kebijakan perlindungan anak, pola asuh anak dan remaja, maupun sosialisasi terkait cara mencegah kekerasan dan cara pelaporan kasus kekerasan sangat dibutuhkan dan perlu untuk dilakukan. Dalam pelaksanaan sosialisasi Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri bekerjasama dengan Satgas PPA. Satgas PPA bertugas untuk menghubungkan antara masyarakat dengan Dinas.
3. Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri tidak menarget keberhasilan pelaksanaan program. Tetapi, Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri menargetkan sosialisasi dapat menyeluruh dan penanganan korban yang maksimal. Ketika sudah ada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, maka masyarakat sudah memahami apa yang disampaikan Dinas melalui sosialisasi.

### **Referensi**

- Boreel, Marsya Sabilla, dkk. 2022. Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 3, No. 3
- Dhessy. 2021. Pandemi, Kasus Pelecehan Seksual Anak Wonogiri Naik. <https://www.gatra.com/news-528711-hukum-pandemi-kasus-pelecehan-seksual-anak-di-wonogiri-naik.html>
- Jones, Charles O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). (Ricky Ismanto, Terjemahan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuroniyah, Wardah. 2022. Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Emboke) Sebagai Upaya Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Cirebon. *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 04 No. 01
- Rahayu, Aristiana Prihatining dan Waode Hamsia (2020). *Risk of Children Violence Abuses Based on Social And Demographic Factors in The Slum Areas. International Research-Based Education Journal* Volume 2 No.2
- Rahman, Khairul, dkk (2022). *Impementation of Government Regulations in The Implementation of Child Protection in Rokan Hilir Regency of Indonesia. International Journal of Health Sciences*, (S4), 52-548
- Setyani, Nindi Nurfahmi, dkk. 2021. Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-laki Di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019. *International Journal of Child and Gender Studies* Vol.7, No. 1